

# HIV/AIDS & Sexually Transmitted Diseases

August 12, 2009

## INDEX :

The Jakarta Globe: Huge Challenges Still Ahead to Combat AIDS  
Kompas : Pemuda Hadapi Banyak Tantangan  
Kompas : 1,7 Juta Terinfeksi  
Kompas : Aturan Hambat Penanganan AIDS  
Seputar Indonesia : Stok Kritis,5% Darah Donor Tercemar  
Republika: WHO: Sunat Mencegah AIDS  
Jurnal Nasional: Global Fund ATM Kucurkan Rp240 Milliar untuk TB  
The Jakarta Post : Papua better protecting women against HIV/AIDS  
The Jakarta Post : Low-risk' women face high risk of HIV infection  
The Jakarta Post : Youth groups make stand at ICAAP  
Antara: CHEVRON KLAIM PIONIR ANTI DISKRIMINASI HIV/AIDS  
Antara: MUSI RAWAS TIDAK MILIKI DANA PENANGGULANGAN HIV/AIDS  
Antara: PENDERITA AIDS ASAL MUSI RAWAS MENINGGAL  
Antara: KBI AIDS LINDUNGI PEKERJA DAN MASYARAKAT  
Antara: ICAAP: KHITAN SALAH SATU CARA CEGAH AIDS  
Antara: WHO REKOMENDASIKAN SUNAT CEGAH AIDS  
Antara: PEMBUAT PASPORT PALSU KORBAN TRAFFICKING DIBEKUK  
Antara: PENDIDIKAN DAN DANA BAGI PEREMPUAN PSK PENTING  
The Jakarta Post: Crisis threatening war on HIV/AIDS  
The Jakarta Post: Opinion : Hope to reality: Transforming the AIDS response  
Antara: PEMPROV GORONTALO WASPADAI PENYEBARAN AIDS

\*\*\*

## 1. The Jakarta Globe

August 12 , 2009

Huge Challenges Still Ahead to Combat AIDS Nusa Dua, Bali. Leading health experts meeting here have called for a repeal of outdated laws that criminalize prostitution and homosexuality in a number of Asia-Pacific nations in order to improve access to medical treatment for people living with HIV/AIDS. "The main challenges are overcoming stigma and discrimination, and repealing the outdated laws and legislation that some countries have," Prasada Rao, director of UNAIDS Asia Pacific regional support

team, said on the sidelines of the four-day 9th International Congress on AIDS in Asia and the Pacific, taking place in Bali. And other experts said while progress had been made in research and in improving access to AIDS treatment, huge challenges lay ahead and much more needed to be done in the fight against AIDS. "All this progress is not meaningful if we don't address the stigma and discrimination in this region. Young children [whether infected themselves or having family members who are infected with HIV/AIDS] are still being evicted from schools," Rao told the conference. "This must change. Without this change, progress is not possible." After HIV/AIDS was first identified in the early 1980s it unleashed a wave of fear and prejudice against people from high-risk groups such as gay and bisexual men, drug users and prostitutes. And 20 years on, these prejudices remain. Everywhere around the world, criminalization of behavior involving illicit drug use, sex work and sex between men is seriously hampering effective prevention and support programs, according to experts working to assist people living with HIV/AIDS. "For gay men, we need to reach out to these people, but if their behavior is criminalized, they are not going to come forward and say 'hey, I need help.' This is a classic case of a clash between public health and public security," said Loretta Wong, head of Hong Kong-based group AIDS Concern. "If they don't get access to services and treatment, their health can't be monitored, and they won't get tested. They will instead be driven underground and there will be a risk of infections increasing," she said. The conference also heard strong calls for increased access to treatment. Women and children particularly were left out of the loop, experts said. "We are supposed to be achieving universal access by 2010, but we are not going to meet these goals," said David Cooper, director of Sydney's National Centre in HIV Epidemiology and Clinical Research. Although about 3 million people were receiving drugs to control HIV by the end of 2007 — nearly 950,000 more than at the end of 2006 — only 31 percent of people in need of drugs were receiving them. Cooper said children and pregnant women in low- and middle-income countries need more and better drugs, partly to prevent infants from being infected by their mothers. "There is incontrovertible new evidence that treating women with antiretroviral therapy in pregnancy and during their breast-feeding period will almost eliminate HIV infection in their infants. "But we are not getting access to these women and we are not treating them with proper antiretroviral therapy. We are just giving them single-dose drugs," Cooper said.

## 2 . Kompas

August 12 , 2009

Pemuda Hadapi Banyak Tantangan Jakarta, Kompas - Menghadapi Tahun Pemuda Internasional, pemuda menghadapi banyak tantangan, seperti kemiskinan, pengangguran, buta aksara, hingga terinfeksi HIV/AIDS. Saat ini jumlah pemuda mencapai 18 persen dari total penduduk dunia. Namun, sekitar 200 juta pemuda dunia hidup miskin, 88 juta orang menganggur, dan 160 juta pemuda mengalami masalah gizi. Selain itu, 130 juta pemuda masih buta aksara dan lebih dari 10 juta anak muda hidup dengan HIV/AIDS. Berkaitan dengan peringatan Hari Pemuda Internasional yang diperingati Rabu (12/8), Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) meminta pemerintah dan semua pihak untuk bisa memberikan perhatian terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi pemuda saat ini. Direktur Jenderal UNESCO Koichiro Matsuura

mengatakan, penting untuk merangkul dan mempersiapkan pemuda bagi kesinambungan dunia. Para pemuda itu juga perlu diajak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan."Semua anak muda mesti menyalurkan energi dan kreativitasnya dengan cara-cara damai dan berkesinambungan," kata Koichiro.Ade Irawan dari Koalisi Pendidikan mengatakan, generasi muda bangsa ini menghadapi tantangan yang berat untuk memajukan bangsa. Jika pemerintah tidak mau berinvestasi secara serius dalam pendidikan yang berkualitas, tantangan dan masalah yang dihadapi pemuda pada masa mendatang akan semakin berat. (ELN)

### 3. Kompas

August 12 , 2009

#### 1,7 Juta Terinfeksi

Perempuan Rentan terhadap Kekerasan Fisik Nusa Dua, Kompas - Sekitar 1,7 juta perempuan di Asia hidup dengan HIV positif. Mereka kebanyakan terinfeksi dari suami atau pasangan pada hubungan jangka panjang. Hal ini terjadi karena perempuan tidak memiliki daya tawar dalam relasi seksual dengan pasangannya akibat kuatnya kultur patriarki di negara-negara di Asia."Sayangnya program-program intervensi pada pria berperilaku risiko tinggi tertular HIV belum mendapat tempat dalam perencanaan dan prioritas nasional penanggulangan HIV di negara-negara di Asia," kata Direktur Regional Badan Dunia Penanggulangan AIDS (UNAIDS) untuk Asia Pasifik Prasada Rao dalam Konferensi Internasional AIDS Asia Pasifik, Selasa (11/8) di Nusa Dua, Bali.Pada hari ketiga acara, pengamanan diperketat. Untuk memasuki lokasi kongres, setiap pengunjung harus melewati empat kali pemeriksaan oleh polisi dan petugas keamanan hotel. Pada pintu terakhir di dalam gedung Bali International Convention Center (BICC), semua pengunjung harus menunjukkan kartu peserta ke alat elektronik.Untuk mencegah penularan HIV kepada pasangan, intervensi pencegahan HIV harus diperluas pada pria yang berhubungan dengan sesama lelaki, pria pengguna narkoba suntik, dan pengguna jasa seks, demi melindungi pasangan tetap mereka.Ketua Yayasan Akses AIDS Thailand Geeta Rao Gupta menambahkan, semua pemangku kepentingan hendaknya tidak menyederhanakan masalah yang dihadapi kaum perempuan dengan hanya sebatas pemberdayaan ekonomi mikro. Sebab, banyak perempuan di sejumlah negara di Asia Pasifik masih menghadapi masalah kekerasan dalam rumah tangga dan rentan tertular HIV dari pasangannya.Laporan Badan AIDS PBB menyebutkan, lebih dari 1,7 juta perempuan di Asia hidup dengan HIV positif. Sekitar 90 persen tertular dari suami atau pasangan seksual mereka. Pada tahun 2008, kaum perempuan menyumbang 35 persen dari total jumlah orang dewasa yang terinfeksi HIV di Asia.Sebagian besar mereka berstatus menikah atau hendak menikah. Di Kamboja, India, dan Thailand, angka tertinggi kasus baru infeksi HIV justru pada para perempuan menikah atau ibu rumah tangga. Di Indonesia, virus itu kini menyebar secara cepat melalui hubungan seks, termasuk pasangan tetap dan pekerja seks.Di Provinsi Papua, laju peningkatan jumlah kasus HIV pada ibu rumah tangga justru lebih tinggi daripada perempuan pekerja seks. "Meski suami berperilaku seks berisiko tinggi, mereka sulit menolak keinginan pasangan untuk berhubungan intim tanpa kondom," ungkap Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua Constant Karma.Karena itu, KPA

Papua gencar mengampanyekan kondom perempuan. Dari 26.500 kondom perempuan yang didistribusikan, dalam dua tahun tersisa 500 kondom. "Ini mempromosikan hak perempuan agar punya kontrol terhadap tubuh mereka," kata Direktur Eksekutif Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Papua Tahi G Butarbutar. Korban kekerasan Menurut studi di sejumlah negara Asia, 15-65 persen dari perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangan sehingga risiko penularan HIV pada mereka meningkat. Berdasarkan studi di Banglades, India, dan Nepal, perempuan yang mengalami kekerasan oleh suami yang HIV positif dan berganti pasangan berisiko beberapa kali lebih tinggi tertular HIV daripada perempuan bukan korban kekerasan dan suami tidak berhubungan seks dengan banyak pasangan. "Kultur patriarki yang kuat di negara-negara di Asia menyebabkan seorang perempuan tidak dapat bernegosiasi dalam berhubungan seks dengan pasangan," kata Prasada Rao. Kaum perempuan secara umum berharap tidak berhubungan intim hingga menikah dan setia pada suami. "Diskriminasi dan kekerasan pada perempuan dan remaja putri berkaitan dengan penyebaran HIV di kalangan mereka," ujar Direktur Regional UNIFEM Asia Selatan Jean D'Cunha.

#### 4. Kompas

August 12, 2009

Aturan Hambat Penanganan AIDS

Jumlah Kasus Tertinggi di Kota Bandung

Nusa Dua, Kompas - Terselip di antara sekitar 2.000 poster sepanjang koridor Bali International Convention Center, di papan nomor 181 terdapat poster tentang penularan HIV/AIDS di Kota Bandung, Jawa Barat. Bercerita tentang penerapan aturan di kota itu, poster seakan mewakili aturan di sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik yang disadari atau tidak turut menghambat upaya penanggulangan HIV/AIDS. Kurangnya pemahaman terhadap penyebaran HIV/AIDS memunculkan peraturan-peraturan yang makin merentankan kelompok berisiko. Hal itu dibahas khusus dalam sidang pleno hari ketiga Kongres Internasional Ke-9 AIDS untuk Kawasan Asia Pasifik (ICAAP Ke-9) di Nusa Dua, Bali. Kyung Whakang, Wakil Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, sebagai pembicara kunci mengingatkan, korban utamanya selalu perempuan dan anak-anak. Jeffrey O'Malley, Direktur AIDS untuk Program Pembangunan PBB (UNDP), mencatat, di Asia Pasifik hampir semua negara melarang keberadaan pekerja seks dan 12 negara melarang hubungan homoseksual. Hanya lima negara yang melegalkan metadon sebagai substitusi obat untuk mengatasi ketergantungan pada narkotika dan hanya empat Negara menjaga hak-hak orang dengan HIV/AIDS. Di poster tampak petugas keamanan menyegel kawasan prostitusi Saritem di Bandung. Di bawahnya ada catatan tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 yang berisi larangan keberadaan anak jalanan, pengemis, dan pekerja seks. Dampak aturan Dibuat oleh Impact Project bekerja sama dengan Klinik Mawar dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bandung dan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, di bagian lain ditulis dampak aturan, dari para pekerja seks yang tersebar yang menyulitkan penyuluhan kesehatan, rendahnya pengadaan kondom di tempat berisiko karena takut digerebek, sampai tidak memadainya

layanan kesehatan untuk mereka. Ini diperkuat UU No 10/1992 tentang Kependudukan, yang menyatakan hanya pasangan laki-laki dan perempuan sudah menikah yang boleh mengakses pelayanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana. Akhir Desember 2008, data Departemen Kesehatan menunjukkan Bandung adalah kota dengan jumlah orang dengan HIV/AIDS tertinggi di Indonesia, yakni 1.856 kasus, jauh di atas Bekasi, 421 kasus. "Banyak negara menghukum orang-orang yang dianggap menyebarkan HIV/AIDS. Akibatnya, orang yang terinfeksi takut melapor dan tak dapat mengakses pengobatan," kata Kyung. Seperti diungkapkan Jon Ungphakorn, Ketua AIDS Access Foundation Thailand, untuk mengefektifkan penanggulangan HIV/AIDS perlu perubahan cara pandang masyarakat terhadap kelompok rentan. (evy/ij/nes)

## 5. Seputar Indonesia

August 12, 2009

### Stok Kritis, 5% Darah Donor Tercemar

MALANG (SI) – Stok darah di Pa-lang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Malang menipis. Padahal, kebutuhan darah diperkirakan akan meningkat menjelang puasa dan Lebaran mendatang. Saat ini, unit transfusi darah (UTD) PMI Kota Malang menyebutkan sisa darah donor tinggal sekitar 400 kantong. Menurut Kepala UTD PMI Kota Malang June Legiawati, jumlah tersebut bisa habis dalam waktu satu minggu saja. "Salah satu factor yang membuat stok darah turun adalah jumlah pendonor yang berkurang. Saat ini masih musim liburan perkuliahan, jadi banyak para pendonor masih berada di luar kota," ujarnya. June mengatakan, penurunan stok terlihat di antaranya pada darah golongan O. Biasanya golongan darah ini memiliki stok di atas 100 kantong, namun saat ini hanya tersisa 60–70 kantong. Padahal, seminggu terakhir ini permintaan kebutuhan darah donor golongan O meningkat tajam. "Kami mendapatkan tambahan dari Pemkot Malang sekitar 100 kantong. Kami upayakan agar pada akhir bulan ini stok darah donor mencapai sekitar 1.000 kantong agar mampu mencukupi kebutuhan hingga Lebaran," ujarnya. PMI juga menyatakan, sekitar 5% darah donor tercemar sejumlah penyakit. Ini diketahui dari screening terhadap darah donor yang mencapai 3.000 kantong per bulan. Virus yang ditemukan di antaranya adalah hepatitis, sifilis, dan HIV/AIDS. "Agar tidak merusak darah donor lain, darah tersebut langsung dimusnahkan. Kami juga melarang pendonor untuk kembali diambil darahnya," ujarnya. Sementara itu, Dinkes Kota Malang mencatat jumlah penderita HIV/ADS di Kota Malang yang sudah mampu teridentifikasi, baik melalui zero survey, VCT, maupun darah donor mencapai sekitar 700 orang. "Khusus untuk balita yang positif terinfeksi, tertular HIV/AIDS dari ibu yang mengandungnya. Makanya, kita melaksanakan penanganan secara khusus terhadap ibu hamil positif HIV/AIDS, untuk meminimalisasi terjadinya penularan terhadap bayi yang dikandungnya," kata Kadinkes Kota Malang Enny Sekarenganingati. (yuswant

## 6. Republika

August 12 , 2009

### WHO: Sunat Mencegah AIDS

Implementasinya masih terbentur sentimen agama. NUSA DUA -- Hasil penelitian di berbagai negara, seperti Thailand, Filipina, dan Amerika Serikat (AS), menunjukkan bahwa sunat atau khitan, yakni tindakan memotong kulup yang diwajibkan dalam ajaran Islam bagi pria Muslim, efektif sebagai salah satu cara mencegah penularan wabah HIV/AIDS. Hasil penelitian ini direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada Kongres Internasional ke-9 tentang AIDS se-Asia Pasifik (ICAAP) yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, 9-13 Agustus. Demikian disampaikan oleh Ketua Kongres Prof Dr Zubairi Djoerban kepada wartawan di tengah kegiatan yang diikuti 3.000 delegasi dari 65 negara tersebut. Ia menyampaikan secara umum negara-negara kawasan Asia-Pasifik dalam kongres di Bali kali ini telah menyetujui penerapan sunat sebagai salah satu cara pencegahan HIV/AIDS. Namun, menurut Zubairi, implementasi sunat diserahkan pada kebijakan masing-masing negara sebab hal itu bersifat rekomendasi. Yang terpenting ke depan adalah implementasi sunat sebagai salah satu cara pencegahan HIV/AIDS di kawasan Asia-Pasifik, namun masih terbentur masalah perbedaan agama. "Walaupun hal tersebut telah dibuktikan secara ilmiah, dalam implementasinya masih terbentur pada masalah SARA. Bagaimana dengan agama? Inilah yang menjadi tantangan," kata Zubairi. Ia memberi contoh di Filipina, walaupun mayoritas masyarakatnya Kristen, semua disunat. Kemudian, di AS, hampir 80 persen penduduknya juga disunat. Yang juga disebutnya penting untuk diaplikasikan ke depan adalah mewujudkan universal akses bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA), salah satunya adalah akses kesehatan. Kondom tak efektif. Sebelumnya, kondom menjadi salah satu cara pencegahan penularan HIV/AIDS. Namun, dari hasil studi Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) menunjukkan bahwa kesadaran menggunakan kondom pada kelompok berisiko cukup rendah sehingga tidak efektif. Kondisi itu dibuktikan dengan tingkat kesadaran penggunaan kondom pada pelanggan pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia hanya mencapai 30 persen. Rendahnya kesadaran ini diprediksi sebagai salah satu penyebab meningkatnya penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual di Indonesia. Tetapi, salah satu data yang cukup mengejutkan, yaitu rendahnya kesadaran penggunaan kondom, akibat terbatasnya kondom di tempat-tempat rawan penularan HIV/AIDS. "Dari hasil studi, hanya 45 persen yang tersedia kondom di tempat rawan HIV/AIDS. Kebanyakan orang keburu 'kebelet' dan akhirnya tidak pakai juga. Memang, kondom tidak selalu tersedia di tempat orang yang membutuhkan," kata Deputi Sekretaris KPAN Bidang Program, Dr Fonny J Silfanus. Guna menanggulangi keterbatasan ketersediaan kondom, KPAN menargetkan pendistribusian kondom gratis di 12 provinsi di Indonesia. Di antaranya adalah Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Riau, Papua, dan Bali. "Program ini menurut rencana mulai berjalan pada bulan September mendatang dengan dana pembelian kondom mencapai Rp 1,3 miliar," kata Fonny. aas/ant

## 7. Jurnal Nasional

August 12 , 2009

Global Fund ATM Kucurkan Rp240 Milliar untuk TB

by : Nunik Triana

UNTUK menanggulangi AIDS, tuberkulosis (TB), serta malaria di Indonesia, The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria (GF ATM) kembali mengucurkan dana hibah. Dana yang dikucurkan kali ini sebesar Rp240 miliar. "Insiden dan tingkat infeksi TB di Indonesia saat ini memang sudah menurun, tetapi TB masih menjadi kasus yang belum usai untuk kita selesaikan", ujar Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Lingkungan Departemen Kesehatan Tjandra Yoga Aditama dalam konferensi persnya usai penandatanganan pemberian hibah, di Nusa Dua, Bali (11/8). Pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan tersebut adalah Direktur Penyakit Menular Langsung Depkes Iwan Muljono, Direktur Eksekutif GF-ATM Michell Kazatchkine, Ketua Umum Pengurus Pusat Aisyiyah Noor Rochmah, Wakil Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Adang Bachtiar, Ketua Country Coordinating Mechanism Indonesia Arum Atmawikarta, serta perwakilan Organisasi Kemasyarakatan Sudijanto Kamso. Pemberian dana hibah ini, menurut Kazatchkine, adalah yang ke-9 kalinya diberikan GF ATM dari kesepakatan kerja sama periode lima tahun dengan total hibah US\$90 juta. Tjandra Yoga mengatakan, penanggulangan TB merupakan program prioritas yang telah mengalami perkembangan cukup signifikan selama pelaksanaan strategi stop TB. Perkembangan secara cepat di Indonesia telah mencapai target global, di mana pada 2006 angka kesembuhannya melebihi 85 persen dan hal ini dapat dipertahankan pada tahun 2008. Terkait dengan pendatanganan penanggulangan TB, selain dana dari APBD, APBN, dan sumber dalam negeri, Indonesia telah menerima bantuan donor luar negeri. Pada tahun 2000, bantuan hibah Pemerintah Belanda digunakan untuk pengembangan pertama Rencana Strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) dan pengembangan program pelayanan kesehatan lainnya. Pada 2002, bantuan dari negara donor mulai meningkat dengan tahun berikutnya berasal dari GF ATMTB Indonesia berada pada peringkat ke-3 di dunia untuk beban TB tertinggi, yaitu dengan 244 kasus per 100 ribu penduduk atau prevalensi 565, 614. Perkiraan prevalensi HIV di antara kasus TB secara nasional adalah 3 persen. Sedangkan kasus resisten obat atau Multiple Drug Resistant (MDR) secara nasional diperkirakan 2,2 persen atau 12.180 kasus TB MDR yang muncul setiap tahun.

## 8. The Jakarta Post

August 12 , 2009

Papua better protecting women against HIV/AIDS

Papua has intensified its campaign promoting the use of female condoms, after reports emerged of an increase in HIV/AIDS infections among residents. Papua HIV/AIDS Commission (KPA) chairman Constant Karma said his organization had worked with local NGOs and large corporations to distribute female condoms to more than 265,000 women. Recipients had included women from high-risk groups including sex workers. Mothers and housewives were targeted, because there had been an increase in HIV/AIDS infections among housewives over the past two years, Constant said at a press conference on the

sidelines of the 9<sup>th</sup> International Congress on AIDS in Asia and the Pacific (ICAAP), here Tuesday. "We will continue working in the domestic sector as we do in entertainment centers and red-light districts - by promoting the use of female condoms. "Otherwise the province will face an AIDS explosion within the immediate future," Constant said. The KPA has no recent statistics on HIV/AIDS in Papua, but according a 2006 survey, 2.4 percent of the province's population of 2.2 million was HIV positive at that time. Previous campaigns to promote safe sex had largely targeted sex industry workers, and subsequently now there was an increase of HIV infections among people outside that group, Constant said. According to the same data, Papua had the second highest prevalence of HIV/AIDS, after West Java. A number of observers have said that the real number of people living with HIV/AIDS was in fact higher than official data suggests, since many people were ashamed to admit they were living with HIV/AIDS. Constant, who is also the former vice governor of Papua, thanked the provincial government and Governor Barnabas Suebu for their efforts in the fight against HIV/AIDS. Constant said in Papua the gender gap was largely to blame for the spread of HIV/AIDS, because under Papua's feudal traditions men are allowed to do anything, including infecting women. Alcoholism and unsafe sex among younger generations had also contributed to the spread, he said. Victor C. Mambor, the coordinator of Stop AIDS Now! Papua group, which works to provide advocacy for people living with HIV/AIDS, said the gender gap made it difficult for women, including housewives, to uphold their sexual rights. "The weak promotion of women's rights leaves them with no bargaining power in facing men, and this has contributed to the increasing prevalence \*of HIV/AIDS\* among housewives. "That is why we have started to involve men in our anti-AIDS campaign," he said. Jayapura Social Development Foundation (YPDM) director Tahi G. Butar-butur said his organization was working was encouraging the involvement of men in an effort to close the gender gap and dispel myths that HIV/AIDS was transmitted by women alone. "The promotion of female condoms among sex workers and housewives will give women more bargaining power ...while simultaneously reducing the spread of HIV/AIDS," he said. "The anti-AIDS campaign and sex education will also be included in the education curriculum at high schools and universities," Tahi said.

## 9. The Jakarta Post

August 12 , 2009

Low-risk' women face high risk of HIV infection They're not sex workers, injection drug users, or men who have sex with other men. They could be household mothers or career women, completely alien to the high-risk activities generally associated with HIV/AIDS. But these women are at an equal risk of contracting HIV/AIDS simply because they are married to, or in a long-term relationship with, men at a high-risk of contracting the disease. In findings released Tuesday, the United Nations Joint Program on HIV/AIDS (UNAIDS) says an estimated 50 million Asian women who were previously considered at a low risk of infection are now at risk of being infected by their partners. It said men who buy sex, most of whom are married or in a relationship, constitute the largest infected population group. "This puts a significant number of women, who are often perceived as being at a \*low-risk' because they only have sex with their husbands or long-term partners, at greater risk of HIV infection," UNAIDS states. The statement estimates that over 90 percent of the 1.7 million women living with HIV in Asia were infected



by their husbands or partners while in a long-term relationship. This is likely the reason why women account for a growing percentage of people with HIV in Asia. In 1990, women constituted 17 percent of all adult HIV infections in the region, but by 2008 the figure rose to 35 percent. However, as Prasada Rao, director of the UNAIDS Regional Support Team for Asia and the Pacific, said HIV prevention programs had so far focused only on high-risk groups. "HIV prevention programs focused on the female partners of men with high-risk behavior still have not found a place in national HIV plans and priorities in Asian countries," Rao said during the launching of the report at the 9<sup>th</sup> International Congress on AIDS in Asia and the Pacific (ICAAP). "We must redouble our efforts to avert needless infections among these women," he added. To prevent HIV transmission among these women, UNAIDS has outlined four key recommendations, including emphasizing to men "the importance of protecting their regular female partners". UNAIDS added that reproductive health programs should be expanded to cover services for male sexual health and that a research must be done to get a better understanding of the dynamics of HIV transmission among intimate partners.

10. The Jakarta Post

August 12 , 2009

Youth groups make stand at ICAAP

A number of youth groups at the International Congress on AIDS in Asia and the Pacific (ICAAP) made a stand today for the rights of young people living with HIV/AIDS. The move came as experts predicted the province would be treating 4,000 people for the disease by the end of 2009. There were already 3,000 reported cases of HIV/AIDS in Bali as of May this year. "We are only able to reach out and assist 500 people living with HIV/AIDS in Bali. There are many more out there," Putu Ayu Utami Dewi, director of Bali Plus, said Tuesday. Bali Plus assists people living with HIV/AIDS. Established in 1994, Bali Plus supports eight groups including the transgender community, gay community, commercial sex workers, family support groups and others across six regencies in Bali. "We are trying hard to rebuild their self-esteem as well as increase people's awareness of HIV/AIDS to enable those living with the disease to improve their quality of life," Utami said. "It is important to gain support from young people and the community in general. The community and administration of Bali should take some real steps to assist people with HIV/AIDS." During an event Tuesday at ICAAP, a number of young participants announced a joint commitment named the Bali Youth Force. This integrated alliance of local and international youth organizations from across the Asia-Pacific region came together to advocate for the rights of young people. The alliance issued a number of recommendations derived from a month-long online survey of more than 50 people from across the Asia Pacific, along with the experiences and input of around 130 youth delegates who attended a two-day conference held prior to ICAAP. The first recommendation called for young people to push for meaningful participation in policies that affect their lives and programs about youth issues. "Those making decisions and outlining policies must foster partnerships between youth and adults at a local, national and international level," said Elfira Nacia, a youth representative from Bali. "Governments must respect, protect and fulfil young people's sexual and reproductive rights, including the right to comprehensive sexual education. This enables them to make

informed decisions about their lives," said Rachel Arinii, General Secretary of the Indonesia Independent Youth Alliance. Other recommendations called for the sexual rights of young people to be comprehensively protected, such as the right to access condoms, health services, safe abortions, emergency contraception, voluntary counseling, testing for HIV/AIDS and treatment for sexually transmitted infections. Data from the Bali Health Agency showed that nearly half of the 1,400 people diagnosed HIV positive were in their 20s, while 35 percent were in their 30s.

11. Antara

August 12, 2009

#### CHEVRON KLAIM PIONIR ANTI DISKRIMINASI HIV/AIDS

Denpasar, 12/8 (ANTARA) - Pimpinan Chevron, perusahaan energy multinasional yang beroperasi di 150 negara mengklaim sebagai pionir kegiatan anti diskriminasi HIV/Aids di tempat kerja, Director Medical Asia and Pasific Chevron Dr James S. Allen mengemukakan hal itu di Denpasar, Selasa malam. Ia mengatakan, chevron salah satu perusahaan di dunia yang lebih dulu punya komitmen terhadap HIV/Aids dan menerapkannya di lingkungan tempat kerja dengan tidak mendiskriminasi penderita penyakit tersebut. Kebijakan anti diskriminasi Hiv/Aids di Chevron telah dimulai dari pertama kali merebaknya kasus penyakit itu yang menyebabkan salah seorang karyawannya meninggal di San francisco, Amerika Serikat. Menurut Allen, meskipun kebijakan anti dikriminasi HIV/Aids di tempat kerja telah lama diterapkan perusahaan namun di beberapa negara lokasi operasional Chevron kebijakan tersebut lambat diadopsi. "Lambatnya perusahaan di negara bersangkutan mengadopsi kebijakan ini karena adanya perbedaan diantaranya terkait pemahaman agama dan kebijakan dari pemerintah di negara itu sendiri," kata Allen, Namun, lanjut dia, kebijakan anti diskriminasi penderita HIV/Aids atau lebih dikenal dengan program global HIV/Aids di tempat kerja itu kini telah mulai tersebar luas di negara-negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Kebijakan perusahaan tersebut membuat para karyawan bangga karena perusahaan peduli HIV/Aids dan perusahaan juga mau terlibat dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan pada masyarakat agar jangan banyak yang tertular HIV/Aids. "Anti diskriminasi terhadap penderita HIV/Aids terhadap karyawan dengan memberikan support baik secara mental maupun medical dan percaya dengan prinsip kerahasiaan," ujar Allen. Prinsip kerahasiaan yang dimaksudnya adalah hanya dokter perusahaan yang mengetahui seorang karyawan terinfeksi HIV/Aids dan tidak memberitahukannya pada pihak lain. Allen menjelaskan, kebijakan yang dibuat perusahaan dengan tetap menerima penderita dan merangkul mereka seperti karyawan sehat lainnya merupakan bentuk upaya perusahaan untuk mencegah penularan penyakit itu agar tidak makin meluas. Chevron Indonesia Lebih jauh Allen menjelaskan keberadaan Chevron di Indonesia selama 85 tahun yang berupaya memberikan sumbangan pada masyarakat dengan membangun infrastruktur yang dibutuhkan publik, seperti jembatan, jalan, dan gedung sekolah. "Makanya kita punya kebijakan untuk peduli kesehatan masyarakat tidak saja tercangkup dengan kebijakan HIV/Aids tapi juga mencakup kepedulian kita dengan penyakit lainnya yang kritis seperti Tuberclosis (TB) dan Malaria," katanya. Untuk melawan

penyakit itu pihaknya bermitra dengan lembaga lain dan pemerintah. Bahkan Chevron telah mengeluarkan dana Rp30 juta dolar Amerika untuk memberantas penyakit HIV/Aids, TB dan Malaria. "Binis Chevron di bidang energi dan kita bukan perusahaan yang bergerak dibidang kesehatan masyarakat, itu sebabnya Chevron bermitra dengan lembaga lain dan pemerintah untuk memberantas tiga penyakit tersebut," katanya. Allen mengakui, ketiga penyakit itu merupakan penyakit utama di lokasi perusahaan bahkan ada enam negara yang menjadi perhatian pihaknya yakni Afrika Selatan, Nigeria, Thailand dan Indonesia untuk pemberantasan penyakit HIV/Aids, Filipina dengan penyakit TB dan Angola dengan penyakit malaria. Sementara itu Manager Health dan Medical Services Chevron Indo Asia Business Unit (IBU) Dr. Wisprayogie mengatakan beberapa program yang dilakukan Chevron untuk menumbuhkan kesadaran tentang bahaya HIV/Aids dilingkungan kerja diantaranya memberikan pendidikan pada hampir 60.000 karyawan Chevron diseluruh dunia dengan menekankan pada kesadaran, mengurangi stigma ditempat kerja serta memberikan pemahaman tentang bagaimana melindungi diri dan keluarga. "Kami ingin memberikan contoh nyata bagaimana sebuah perusahaan swasta dapat berpartisipasi aktif dalam pencegahan penyakit ini dilingkungan kerja," katanya. E010/ (T.E010/B/B011/B011) 12-08-2009 08:44:55 NNNN

## 12. Antara

August 11, 2009

MUSI RAWAS TIDAK MILIKI DANA PENANGGULANGAN HIV/AIDS Musi Rawas, Sumsel, 11/8 (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan hingga saat ini tidak memiliki dana khusus untuk penanggulangan penyakit HIV/AIDS. "Dananya baru akan diajukan dalam APBD-Perubahan tahun 2009 ini, itupun diajukan setelah ada korban yang terjangkit HIV/AIDS di daerah ini," kata Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan P2PL pada Dinas Kesehatan Musi Rawas, Yanuar Shaleh, Selasa. Dikatakannya, tim khusus penanggulangan penyakit yang dimiliki Dinkes setempat diberi nama TGC (Tim Gerak Cepat), kendati telah memiliki empat armada jenis kendaraan roda empat, namun hingga sekarang tidak memiliki dana operasional. Akibatnya pengoperasi kendaraan TGC mengandalkan dana bantuan dari Dinkes Musi Rawas. Tim TGC ini selain untuk melakukan kegiatan sosialisasi ke berbagai daerah juga untuk menanggulangi wabah penyakit dipelosok desa mulai dari, diare, muntaber, DBD hingga HIV/AIDS. "Mobil ini lengkap, ada laboratorium, surveilance penyakit, gudang obat serta ruang medis. Dimana dengan kendaraan ini petugas melakukan pengambilan sample darah di kawasan rawan penyebaran HIV/AIDS, jadi kalau tidak ada anggarannya kita sulit untuk bergerak khususnya untuk penanggulangan HIV/AIDS," jelasnya. Dengan adanya TGC tersebut semuladiharapkan akan menampung berbagai keluhan akibat penyakit yang menyebar di masyarakat, berikut langkah antisipasi yang dapat dilakukan dinas terkait. Dilihat dari letaknya Kabupaten Musi Rawas di kawasan jalan lintas Sumatra (Jalinsum) memungkinkan terjadinya penyebaran penyakit dengan cepat, yang dibawa oleh orang yang melewati daerah ini. Jika di Lubuklinggau ada kawasan lokalisasi, sehingga penyebaran penyakit seksual menular dan HIV/AIDS dapat dipantau. Tapi di Musi

Rawas tidak ada lokasi khusus, sehingga para pekerja seks komersial sulit untuk dimonitoring. Jadi harus rajin mengecek ke kafe-kafe yang banyak beroperasi di sepanjang Jalinsum. Sejauh ini, tambah dia perhatian Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti, terhadap dunia kesehatan di daerah itu sangat besar dan telah mewacanakan akan membentuk Crisis Center, sebagai pusat pelayanan dan penerimaan laporan tentang kesehatan, maupun laporan wabah penyakit yang terjadi di desa-desa. Namun sejauh ini, pembentukan Crisis Center tersebut belum diketahui kejelasannya, padahal jika direalisasikan akan membantu kelengkapan data kesehatan berikut antisipasi yang dapat dilakukan dinas terkait. (T.PK-NMD/B/I016/I016) 11-08-2009 20:39:20 NNNN

13. Antara

August 11, 2009

#### PENDERITA AIDS ASAL MUSI RAWAS MENINGGAL

Musi Rawas, Sumsel, 11/8 (ANTARA) - Penderita AIDS asal Kelurahan Sarolangun, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan yang sebelumnya dirawat di RS dr Sobirin selama sepekan, akhirnya meninggal dunia. "Dia meninggal dunia satu hari lalu dan saat ini jenazahnya sudah dimakamkan pihak keluarganya di Kelurahan Sarolangun," kata Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan P2PL pada Dinas Kesehatan Musi Rawas, Yanuar Shaleh, Selasa. Dikatakannya, Cek Mad berusia 30 tahun lebih, menderita penyakit AIDS setelah lama bermukim di Jakarta, dan baru tiga bulan belakangan kembali ke kampungnya dalam keadaan sakit. Korban sebelumnya sudah beberapa kali menjalani perawatan di RS Rupit, RS dr Sobirin, dan akan dirujuk pula ke rujuk ke RS dr Mohammad Husin Palembang yang memiliki ruang isolasi khusus penderita HIV/AIDS, namun belum sempat dibawa korban sudah keburu meninggal dunia. Kendati korban sudah beberapa hari meninggal dunia, sebelumnya masyarakat daerah ini banyak yang tidak mengetahui keberadaan dan asal usul korban, karena untuk memastikan seseorang menderita penyakit AIDS membutuhkan diagnosa terlebih dahulu. "Jadi kita harus hati-hati mengeluarkan pernyataan kepada umum, karena biasanya keluarga dan penderita penyakit AIDS akan dikucilkan di masyarakat," ujarnya. Penderita penyakit tersebut, katanya, diduga terjangkit AIDS sejak berada di Jakarta. Di ibukota dia bekerja di salon kecantikan, dan kuat dugaan dia mengidap kelainan seksual (homo seksual). Untuk mengantisipasi penyebaran virus HIV dan penyakit AIDS, Pemkab setempat melalui Dinas Kesehatan telah melakukan penyuluhan ke berbagai kalangan, maupun pengambilan sample darah pada tempat-tempat rawan penyebaran HIV/AIDS seperti di kafe dan warung remang-remang dan LP Narkoba. "Target kita adalah kafe, warung remang-remang dan LP Narkoba, dan untuk tempat yang terakhir secara rutin dilakukan pengecekan setiap bulan. HIV/AIDS menyebar melalui hubungan seks bebas, perilaku seks menyimpang dan pemakaian narkoba dengan menggunakan jarum suntik," katanya. Sementara itu hasil dari surveilance HIV/AIDS yang dilakukan Dinkes setempat pada awal Agustus lalu, petugas mendapati satu penderita positif terinfeksi HIV, namun saat akan diisolasi petugas yang bersangkutan sudah tidak ada lagi di kawasan itu. "Salah seorang wanita penghibur yang dinyatakan positif terinfeksi HIV itu beroperasi di kawasan STD STL Ulu Terawas, tapi saat akan dijemput petugas yang bersangkutan sudah tidak ada lagi di lokasi, dan hingga kini kita kesulitan untuk melacaknya," kata Yanuar.

14. Antara

August 11, 2009

#### KBI AIDS LINDUNGI PEKERJA DAN MASYARAKAT

Nusa Dua, Bali, 11/8 (ANTARA) - Koalisi Bisnis Indonesia (KBI) untuk AIDS, komunitas perusahaan multinasional dan internasional yang beroperasi di Tanah Air, menggiatkan upaya melindungi para pekerjanya dan masyarakat dari penyebaran virus HIV. Komunitas bisnis itu turut berpartisipasi dalam Kongres Internasional AIDS Asia-Pasifik Ke-9, di Nusa Dua, Bali. "Kami memiliki komitmen bersama untuk menurunkan tingkat prevalensi HIV/AIDS di antara para pekerja, keluarga mereka, dan masyarakat," kata Juru Bicara PT Freeport Indonesia Mindo Pangaribuan, di Bali, Selasa. Pangaribuan menyatakan, terdapat beberapa langkah yang dilakukan komunitas bisnis dengan aset miliaran dolar AS itu guna menguatkan komitmen itu, di antaranya melalui pelatihan dan penyebaran informasi tentang HIV/AIDS, langkah pencegahan, dan penanggulangan serta pelayanan kesehatan. "Jadi kalau ada pekerja yang ternyata positif HIV mereka bisa segera mendapat tempat untuk perawatan kesehatannya. Yang lebih penting, kami tidak akan mendiskriminasikan mereka dan identitas mereka kami lindungi sepenuhnya," katanya. Resiko terkena virus HIV yang kemudian bias berkembang menjadi AIDS itu semakin tinggi di wilayah operasi yang terpencil di hutan-hutan dan pegunungan. Salah satunya adalah akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Komunitas bisnis yang berdiri sejak Desember 2006 itu terdiri atas berbagai perusahaan internasional dan multinasional di Indonesia. Didirikan oleh tujuh perusahaan besar, yaitu PT Freeport Indonesia, Chevron IndoAsia, PT Gajah Tunggal Tbk, Sinar Mas Group, Beyond Petroleum, Sintesa Group, dan Unilever Indonesia. Salah satu alasan yang membuat komunitas ini berdiri adalah kenyataan bahwa penyebaran HIV/AIDS telah begitu besar dan merata. "Kalau ini dibiarkan bisa berbahaya bagi individu bersangkutan, perusahaan, dan negara Indonesia," katanya. Dalam upaya penyebaran informasi itu, komunitas ini terus menyelenggarakan berbagai pelatihan, baik kepada individu karyawan atau untuk pelatih. Dengan demikian diharapkan efek bola salju penyebaran informasi ini bisa terjadi sempurna. Hal itu didukung Manajer Kesehatan dan Pelayanan Medis Chevron IndoAsia Wisprayogie, yang menyatakan, kepedulian perusahaan bagi kesejahteraan dan kesehatan karyawan semakin penting dari masa ke masa. "Juga kami peduli pada kenyataan bahwa masih banyak perusahaan yang belum mengimplementasikan kebijakan nasional terkait masalah HIV/AIDS ini. Kami juga tidak segan untuk saling belajar dan memahami serta mengaji masalah ini di dalam komunitas ataupun di luar komunitas," katanya. Menurut dia, hampir semua karyawan perusahaan itu telah mendapat pelatihan tentang penyebaran HIV/AIDS, langkah penanggulangan, dan pelayanan medis yang diperlukan jika seseorang telah terkena virus mematikan itu. Dari sisi pertanggungjawaban sosial perusahaan yang berusaha di Indonesia kepada masyarakat, katanya, perusahaan-perusahaan itu juga aktif membina dan mendukung berbagai aktivitas yang dilakukan LSM-LSM terkait.

(T.A037/B/s018/s018) 11-08-2009 22:47:59 NNNN

15. Antara

August 11, 2009

ICAAP: KHITAN SALAH SATU CARA CEGAH AIDS

Nusa Dua, 11/8 (ANTARA) - Ketua Panitia Kongres Internasional AIDS Asia Pasifik atau ICAAP ke-9 Prof Dr Zubairi Djoerban mengemukakan bahwa khitan merupakan salah satu cara mencegah penularan AIDS.

"Hasil penelitian di berbagai negara, seperti Thailand, Filipina dan Amerika Serikat menunjukkan khitan atau sunat efektif sebagai salah satu cara mencegah penularan HIV/AIDS," katanya di sela-sela kegiatan ICAAP di Nusa Dua, Bali, Selasa. Menurut dia, Badan Kesehatan Dunia (WHO) saat ini bahkan telah merekomendasikan khitan dalam upaya pencegahan HIV/AIDS tersebut. Ia mengemukakan bahwa saat ini yang terpenting adalah bagaimana memasyarakatkan khitan tersebut di kawasan Asia Pasifik karena masih terbentur pada masalah perbedaan agama, walaupun hal tersebut telah dibuktikan secara ilmiah.

"Bagaimana dengan SARA, bagaimana dengan agama? Inilah yang menjadi tantangan saat ini.

Sementara di Filipina, walaupun penduduknya banyak Kristen, tetapi khitan bisa diterima dan di Amerika Serikat banyak penduduknya yang dikhitan," katanya. Ia menyampaikan, secara umum negara-negara kawasan Asia Pasifik dalam kongres di Bali kali ini telah menyetujui penggunaan khitan sebagai salah satu cara pencegahan HIV/AIDS. "Namun implementasi khitan itu diserahkan pada kebijakan masing-masing negara, sebab hal itu bersifat rekomendasi," ujarnya. Menurut dia, yang juga penting untuk diaplikasikan ke depan adalah mewujudkan universal akses bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA), salah satunya adalah akses kesehatan. Menurut dia, sebelumnya kondom direkomendasikan menjadi salah satu cara pencegahan penularan HIV/AIDS, namun dari hasil studi Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) menunjukkan kesadaran penggunaan kondom pada kelompok beresiko cukup rendah. "Kondisi ini dibuktikan dengan tingkat kesadaran penggunaan kondom pada pelanggan pekerja seks di Indonesia hanya mencapai 30 persen," katanya. Rendahnya kesadaran penggunaan kondom ini, katanya, diprediksi sebagai salah satu penyebab meningkatnya penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual di Indonesia. "Tetapi data yang cukup mengejutkan yaitu rendahnya kesadaran penggunaan kondom, salah satunya akibat keterbatasan ketersediaan kondom di tempat-tempat rawan penularan HIV/AIDS," katanya. Deputi Sekretaris KPAN Bidang Program Dr Fonny J Silfanus mengatakan, untuk menanggulangi keterbatasan ketersediaan kondom, KPAN menargetkan mendistribusikan kondom gratis di 12 propinsi di Indonesia. "Diantaranya Sumatera Utara, Sumatra Selatan, Riau, Papua dan Bali. Program ini menurut rencana mulai berjalan pada September mendatang dengan dana pembelian kondom mencapai Rp1,3 miliar," katanya. (T.PSO-078/B/M026/M026) 11-08-2009 20:24:39 NNNN

16. Antara

August 11, 2009

#### WHO REKOMENDASIKAN SUNAT CEGAH AIDS

Nusa Dua, 11/8 (ANTARA) - Hasil penelitian di berbagai negara seperti Thailand, Filipina dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa sunat atau khitan, yakni tindakan memotong kulup, efektif sebagai salah satu cara mencegah penularan HIV/AIDS. Hasil penelitian itu direkomendasikan oleh badan kesehatan dunia (WHO) sebagai salah satu cara pencegahan HIV/AIDS pada kongres internasional tentang AIDS "International Congress on AIDS in Asia and the Pacific" (ICAAP) ke-sembilan yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Selasa. Demikian disampaikan Ketua Kongres Ke-9 ICAAP, Prof. Dr Zubairi Djoerban kepada wartawan yang meliput kegiatan yang berlangsung 9-13 Agustus dan diikuti 3.000 delegasi dari 65 negara tersebut. Menurut Zubairi, yang terpenting kedepan adalah implementasi sunat sebagai salah satu cara pencegahan HIV/AIDS di kawasan Asia-Pasifik, karena hingga kini masih terbentur masalah perbedaan agama. "Walaupun hal tersebut telah dibuktikan secara ilmiah, namun dalam implementasinya masih terbentur pada masalah SARA. Bagaimana dengan agama? Inilah yang menjadi tantangan," katanya seraya memberi contoh di Filipina, walaupun mayoritas masyarakatnya Kristen, tetapi semua disunat, kemudian Amerika Serikat hampir 80 persen penduduknya juga disunat. Ia menyampaikan secara umum negara-negara kawasan Asia-Pasifik dalam kongres di Bali kali ini telah menyetujui penerapan sunat sebagai salah satu cara pencegahan HIV/AIDS. Namun implementasi sunat diserahkan pada kebijakan masing-masing negara, sebab hal itu bersifat rekomendasi. Menurutnya yang juga penting untuk diaplikasikan kedepan adalah mewujudkan universal akses bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA), salah satunya adalah akses kesehatan. Sebelumnya kondom menjadi salah satu cara pencegahan penularan HIV/AIDS, namun dari hasil studi Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) menunjukkan kesadaran menggunakan kondom pada kelompok beresiko cukup rendah. Kondisi ini dibuktikan dengan tingkat kesadaran penggunaan kondom pada pelanggan pekerja seks komersial di Indonesia hanya mencapai 30 persen. Rendahnya kesadaran menggunakan kondom ini diprediksi sebagai salah satu penyebab meningkatnya penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual di Indonesia. Tetapi data yang cukup mengejutkan yaitu rendahnya kesadaran penggunaan kondom salah satunya akibat keterbatasan ketersediaan kondom di tempat-tempat rawan penularan HIV/AIDS. "Dari hasil studi, hanya 45 persen yang tersedia kondom di tempat rawan HIV/AIDS. Kebanyakan orang keburu `kebelet` dan akhirnya tidak pakai juga. Memang kondom tidak selalu tersedia di tempat orang yang membutuhkan," kata Deputy Sekretaris KPAN Bidang Program Dr. Fonny J Silfanus. Guna menanggulangi keterbatasan ketersediaan kondom, KPAN menargetkan untuk mendistribusikan kondom gratis di 12 provinsi di Indonesia. Di antaranya Sumatera Utara, Sumatra selatan, Riau, Papua dan Bali. Program ini menurut rencana mulai berjalan pada bulan September mendatang dengan dana pembelian kondom mencapai Rp1,3 miliar, tambah

Fonny. (T.PSO-078/B/T007/T007) 11-08-2009 18:22:20 NNNN

17. Antara

August 11, 2009

#### PEMBUAT PASPORT PALSU KORBAN TRAFFICKING DIBEKUK

Bandung 11/8 (ANTARA) - Pembuat pasport palsu korban trafficking berinisial L asal Jakarta, diringkus Jajaran Kepolisian Polwiltabes Bandung, Selasa. "Dengan tertangkapnya tersangka baru, korban penjualan manusia ini jadi bertambah menjadi lima tersangka," ujar Kapolwiltabes Bandung Kombes Pol Imam Budi Supeno kepada wartawan, di Bandung, Selasa. Menurut Kapolwil, kasus ini akan terus diproses hingga tuntas. Awalnya, ada empat orang tersangka, tiga laki-laki dan satu perempuan. "Kasus ini masih tetap kita proses. Ini dibuktikan dengan penambahan tersangka baru yang bertugas sebagai pembuat dokumen palsu," lanjut Kapolwil. Kapolwil menambahkan, dari 68 orang korban trafficking, sebagian besar sudah dipulangkan ke tempat tinggalnya masing-masing. "Para korban itu tujuh orang yang berasal dari Sukabumi, telah dipulangkan ke daerah asalnya," ujar Imam. Para TKW tersebut memang tak dimintai uang saat mendaftarkan diri, namun setelah bekerja, para TKW tersebut dimintai uang bervariasi, biasanya antara Rp7 sampai Rp10 juta. "Para korban yang rata-rata tidak terlatih tersebut dipaksa untuk membayar harga yang telah ditentukan PT Mitra Budiayasa," ujarnya. Jajaran kepolisian Polwiltabes Kota Bandung berhasil menggagalkan dan menyelamatkan sekitar 68 orang wanita korban penjualan manusia (trafficking), Jumat (7/8). Kapolwiltabes Budi, melalui Kasat Reskrim AKBP Arman Achdiat mengatakan, pihaknya pertama kali mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar dua hari lalu. Dalam laporan disebutkan, dua anak perempuan di bawah umur ditawarkan pekerjaan oleh seseorang di Jakarta. "Namun orang tua yang melaporkan kejadian tersebut mengeluh ketika anaknya ingin pulang harus membayarkan uang sebesar Rp2juta. Orang tua tersebut sempat melakukan percakapan dengan anaknya, namun hari berikutnya si anak tidak bisa dihubungi," kata Imam kepada wartawan di Mapolwiltabes Bandung, Jumat malam. Berdasarkan laporan tersebut, lanjut dia, jajaran kepolisian Polwiltabes Bandung dan Polres Metro Jakarta Timur langsung melakukan penggerebegan di sebuah rumah di Jalan Abdullah Syafei No 5 Jakarta Timur. "Dalam penggerebegan tersebut, polisi menyelamatkan 68 orang wanita, 27 di antaranya masih di bawah umur. Selain itu, polisi akhirnya menetapkan empat tersangka yang salah satunya adalah wanita," ujar Kapolwiltabes. Kapolwil mengungkapkan, alamat yang polisi datangi itu merupakan sebuah rumah yang dijadikan kantor PT Mitra Budiayasa yang tidak memiliki izin. "Tersangka dijerat dengan pasal berlapis di antaranya pasal 102 dan 103 Undang-undang NO 34/2009 tentang perlindungan anak pasal 88 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara," kata Arman. (T.PSO-058/B/J003/J003) 11-08-2009 19:27:54 NNNN

18. Antara

August 11, 2009

#### PENDIDIKAN DAN DANA BAGI PEREMPUAN PSK PENTING

Nusa Dua, Bali, 11/8 (ANTARA) - Sejumlah ahli dan pegiat LSM perlindungan pengidap HIV/AIDS sepakat menyerukan pendidikan dan dana bagi para perempuan pekerja seksual komersial (PSK) agar



penyebaran penyakit mematikan itu bisa dikurangi. Demikian salah satu kesimpulan dalam simposium bertajuk "Mewujudkan Kesehatan Reproduksi Perempuan PSK", dalam Kongres Internasional AIDS Asia-Pasifik (ICAAP) Ke-9, di The Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa siang. Menurut Jeniffer Butler, ahli kesehatan masyarakat dari Program Pokok HIV dan Pekerja Perempuan PBB (UNFPA), yang menjadi pembicara utama simposium itu, penguatan jaringan yang bertujuan meningkatkan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan PSK harus dilakukan serentak. "Proses pendidikan kesehatan reproduksi dan penyebaran HIV/AIDS ini menjadi satu paket yang konklusif dalam upaya kita menanggulangi penyakit ini. Ini tidak bias dilakukan secara parsial walaupun kondisi masing-masing Negara berbeda," katanya. Dia menyatakan, model yang sukses dilakukan di berbagai negara di Kawasan Asia-Pasifik bisa menjadi satu proyek pembelajaran yang disebarluaskan di antara negara-negara di kawasan itu. Salah seorang perempuan PSK asal Australia, Ann Marie, yang juga hadir, menyatakan, di negaranya sudah sangat umum bagi pemakai jasmereka untuk memakai alat kontrasepsi kondom guna mencegah penularan virus HIV. Hal ini telah menjadi semacam standard pelayanan yang dipatuhi bersama oleh komunitas perempuan PSK. "Tetapi masalahnya, tidak semua pemakai jasa kami bisa memahami betapa penting masalah ini. Kebanyakan, mereka hanya memakainya secara tergesa-gesa dan tidak teliti. Ini jadi masalah serius bagi kami," katanya. Menurut perempuan PSK itu, jika PBB dan berbagai lembaga lain ingin menyentuh kalangan perempuan PSK untuk mau menerima pendidikan praktis pencegahan penularan HIV, maka harus mau menyelami cara berpikir dan bertindak para perempuan PSK itu. Proses pendidikan itu, katanya, jelas memerlukan dana. "Kalau tidak ada dana maka tidak akan ada program. Jika tidak ada program, maka penyebaran penyakit ini bisa semakin meluas dan mematikan kami serta pelanggan dan pihak lain," katanya. Seorang perempuan PSK dari Papua Niugini, juga menyatakan hal serupa bahwa mereka sebetulnya telah sangat paham resiko sumber nafkah mereka terhadap kesehatan. "Kami perlu uang untuk menyebarluaskan pemahaman ini. Kami tidak punya uang namun kami mau belajar, dan benar bahwa perempuan PSK tidak pernah sekolah baik," katanya. Menanggapi masalah itu, Butler menyatakan, pendanaan itu bisa berasal dari mana saja dan tidak usah bergantung dari badan-badan internasional semata. Kalaupun dana itu bisa dicairkan kepada LSM pegiat masalah HIV/AIDS di kalangan perempuan PSK maka sebelumnya program kerja mereka harus jelas dan tepat. "Ini juga menjadi satu masalah tersendiri karena tanpa kejelasan program kerja maka pihak donor juga kesulitan bisa mendanai program itu. Saya kira semua pihak setuju untuk membantu dan bersama bekerja untuk menanggulangi masalah ini," katanya. Secara umum, ICAAP Ke-9 di Bali kali ini menjadi satu batu pijakan penting menuju tenggat waktu pemenuhan target Millenium Development Goal, bahwa pada 2010 nanti Akses Universal dalam pencegahan, pengobatan, dan pelayanan bagi ODHA harus tercapai. Pemerintah Indonesia selaku tuan rumah mengetengahkan kemajuan yang telah dicapai, bahwa sudah 12.493 ODHA yang telah menjalani perawatan atas HIV/AIDS mereka melalui obat antiretroviral (ARV). Indonesia memang telah mencadangkan dana APBN-nya untuk pos kesehatan bagi subsidi total ARV ini. Dengan program itu, dampak terhadap jumlah pengidap HIV/AIDS menurun drastis, dari 46 persen pada 2006 menjadi cuma 17 persen pada tahun lalu. Masalah kecepatan dan ketepatan respons yang diberikan tiap negara di Kawasan Asia-Pasifik, menjadi satu pokok pembicaraan Direktur Regional Asia-Pacific UNAIDS, Prasada Rao, yang menyatakan, "Dua tahun setelah ICAAP di Kolombo, Komisi AIDS Asia telah meningkatkan pemahaman terkait konteks dan arah yang harus dituju tentang epidemi ini." Rao menyatakan, respons yang diberikan oleh tiap negara kini terasa semakin efektif dan efisien dari sisi pemakaian dana yang diberikan donor serta pihak-pihak lain yang bersedia ikut

menanggulangi epidemic ini. Akan tetapi, kata Rao, terdapat fenomena terhadap peningkatan prevalensi pengidap HIV/AIDS di kalangan lelaki yang berhubungan seksual dengan sesama lelaki serta perempuan PSK. Di Asia Tenggara jumlah itu mencolok terjadi di Kamboja, Myanmar, dan Indonesia. Akan tetapi, khusus untuk Indonesia, jumlah penyebaran HIV/AIDS di antara pemakai narkotika melalui alat suntik menunjukkan penurunan berarti dalam kurun dua tahun terakhir.

(T.A037/B/E001/E001) 11-08-2009 14:08:50 NNNN

19. The Jakarta Post

August 11, 2009

Crisis threatening war on HIV/AIDS

More people with HIV/AIDS are gaining access to medical treatment, but the global fight against the virus is now under threat from the prolonged economic downturn, activists warn. Michel Kazatchkine, executive director of the Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria, said Monday the ongoing global financial crisis was shifting countries' attention from the need to maintain the public health, subsequently leading to reduced health spending. "The Global Fund will be facing major challenges in the coming years in terms of funding," Kazatchkine said at a session of the 9th International Congress on AIDS in Asia and the Pacific (ICAAP), at the Bali Convention Center in Nusa Dua. The Global Fund is an international organization attracting and disbursing additional resources to prevent HIV/AIDS, tuberculosis and malaria worldwide. The organization, jointly founded by governments, civil society groups, the private sector and affected communities, claims to have provided a quarter of all international financing to combat HIV/AIDS globally. Since its establishment in 2002, the agency has become the main source of finance for programs in fighting against the three diseases, with approved funding of US\$15.6 billion for more than 570 programs in 140 countries. Kazatchkine called on governments to maintain their investments in health, to help minimize the impact of the crisis on efforts to tackle HIV/AIDS. "So I hope all of you will help at country level," he said. Speaking at the same forum, Samoan Deputy Prime Minister Misa Telefoni said that while the amount of financial resources to fight HIV/AIDS should be raised, it had to be ensured that recipients made better use of the funds. "We've got to make sure recipients have the capacity to absorb the money," he said. During a meeting Sunday between AIDS ambassadors and activists, Misa said stimulus funds that many governments had planned or disbursed to tackle the global economic crisis should be partly allocated to support efforts to combat HIV/AIDS. AIDS activists joining the session shared the common experience that the costs of treating patients with HIV/AIDS were far more expensive than the costs of prevention. Purnima Mane, deputy executive director of the United Nations Population Fund, said that to make it more cost-effective, prevention should be targeted at high-risk groups, including injecting drug users, men having sex with men, and sex workers. "Preventive measures targeted at high-risk groups are the most effective," she said. "These can prevent up to 80 percent of future HIV infections." In their joint statement Sunday, activists called on governments in the Asia-Pacific region not to neglect efforts to combat HIV/AIDS, despite the global financial downturn.

20. The Jakarta Post

August 11, 2009

Opinion : Hope to reality: Transforming the AIDS response

More than a thousand people become infected with HIV in Asia each day. If only we had invested in reaching populations at higher risk and their partners, most of these infections could have been averted – at a cost of less than half a US dollar per person. The Commission on AIDS in Asia has recommended that the AIDS epidemic in the region be redefined. We must transform the AIDS response so that it works for people. This means protecting sex workers, men who have sex with men, transgender, injecting drug users and women. How can we do this? 1. Decriminalize consensual adult sexual behavior and drug use. 2. Address HIV transmission among intimate partners. 3. Invest in evidence-informed HIV prevention, treatment, care and support programs. 4. Adopt an "AIDS plus Millennium Development Goal" approach. Many countries are changing laws that criminalize consensual adult sexual behavior (including sex work) and drug use, and courts are helping to clarify bad laws. In Indonesia, the Supreme Court ruled that drug users need care, not prison. In Nepal, the highest court has established that transgender and men who have sex with men have equality under the constitution. And in India, the Delhi High Court has restored dignity to millions, by reading down an archaic law that discriminated against men who have sex with men. New Zealand has legalized sex work and reaped the dual benefits of public health and public safety. Australia has demonstrated that law enforcement and public health goals can go hand in hand while dealing with drug use. We can remove punitive laws and policies that block effective responses to AIDS. But the real transformation has to be in the hearts and minds of people. Courts and parliaments can only create an enabling environment. Societies and communities have to change the social norms that allow stigma and discrimination. In India, a pregnant woman was recently branded on her forehead as being HIV positive by hospital staff during a routine check-up. This inhumane treatment of the woman triggered protests by the local community and by human rights activists, which led the Gujarat government to open an investigation. It is this sort of community mobilization that is needed to put an end to such discriminatory acts. Bad laws and a discriminatory society have had a severe impact on women. Many Asian women become infected because their husbands or male partners contracted HIV through drug use or through sex with another man or with a sex worker. In India, being monogamous is the only risk factor for an estimated 90 percent of women living with HIV. In 2008, 35 percent of adults living with HIV in Asia were women, and most of them were in steady relationships. HIV prevention programs must be scaled-up. Political leaders must ensure that existing HIV services are expanded to reach the most vulnerable. This includes starting needle exchange programs and offering oral substitution therapy to drug users, increasing access to antiretroviral drugs, distributing condoms and offering voluntary HIV counseling and testing services to those at higher risk. It is heartening that requests to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria for such programs have increased substantially in recent years. However, we need US\$7.5 billion in 2010 to reach country targets, but only 10 percent of this was available in 2007. We must therefore invest wisely and equitably, especially now in the midst of an economic crisis. Unlike Africa, where the AIDS epidemic can overwhelm development efforts, the Asia and Pacific region can combine development and the AIDS response. Reducing poverty, increasing education and investment in health must become the

foundations for sustainable economic growth in the region. This is what I call the "AIDS plus MDG" movement. Recently I read about Nisha, a person living with HIV in Nepal. She lost her husband in 2004, when there was no access to treatment. Today, she is on antiretroviral therapy. She is staying healthy, has gone back to work and can look after her three children. Her family has come to accept her, and her children go to school, where they are being taught how to protect themselves. Access to treatment has given her an opportunity to fulfill her dreams - this is hope becoming reality. The writer is UNAIDS Executive Director.

21. Antara

August 11, 2009

#### PEMPROV GORONTALO WASPADAI PENYEBARAN AIDS

Gorontalo, 11/8 (ANTARA) - Sejak beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan berbagai upaya dan mewaspadaai penyebaran virus HIV-AIDS di daerah tersebut. Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad mengatakan bahwa seluruh instansi baik pemerintah maupun swasta, harus peka dan waspada terhadap penyebaran wabah penyakit mematikan tersebut. "Peran aktif masyarakat juga sangat diharapkan, agar tetap peduli dengan berbagai penyakit yang mematikan di daerah ini," kata Fadel, Selasa. Dia menjelaskan berdasarkan data yang ada saat ini jumlah penderita AIDS di Gorontalo mencapai 60 orang, meskipun masih rendah dibandingkan dengan daerah lain, namun tetap perlu di waspada dan beroleh perhatian yang serius. Dia mengungkapkan penderita AIDS di Gorontalo pertama kali dilaporkan dan ditemukan tahun 2001 lalu, dan dari tahun ke tahun mulai menunjukkan adanya peningkatan. Sehingga tahun 2009 ini, jumlah penderita mencapai 60 orang berdasarkan laporan berbagai sumber seperti layanan rumah sakit, PMI, serta sero survey yang ada di daerah ini. Fadel mengatakan berdasarkan laporan maupun data yang ada di instansi pemerintah, rata-rata penderita AIDS di Gorontalo merupakan usia produktif yakni 20 hingga 40 tahun. Menurut dia, meskipun jumlah tersebut masih sangat rendah, namun tidak menutup kemungkinan data ini merupakan hasil temuan atau yang dilaporkan, sehingga ada kemungkinan masih terdapat penderita yang tidak termonitor. Untuk mengantisipasi masalah penyebaran penyakit tersebut, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo telah membentuk komisi penanggulangan AIDS (KPA), sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Selain itu telah membentuk kelompok kerja (Pokja) seperti layanan VTC, media dan pokja perencanaan, serta kemitraan dengan LSM, tokoh pemuda, dan lintas sektoral, terus dilakukan dan ditingkatkan koordinasinya. "Pemerintah juga mendukung dengan anggaran yang slumayan, dalam penanggulangan wabah tersebut," kata Fadel. \*\*\*\* 5 \*\*\*\*

(PK-MM/B/MO31) 11-8-2009 9:55 (T.PK-MM/B/MO31/MO31) 11-08-2009

09:00:14 NNNN

\*\*21 articles